



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **POLTAK HASUDUNGAN**
2. Jabatan : **KEPALA SATGAS POL. PP KEC. KALIDERES**
3. NHK : **842703**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.925.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/54 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/30 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 1.800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 450.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/167 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **437.500.000**

1. MOBIL, AGYA SEDAN Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA TYPE G Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA PCX AGS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, YAMAHA FAZZIO LUX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000



5. MOBIL, SUZUKI CARRY Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
6. MOTOR, YAMAHA RX KING Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
6.500.000
7. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.389.500.000
III. HUTANG	Rp.	2.171.800.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.217.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.